



MUKOMUKO

SENIN, 09 OKTOBER 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Bidik Dana Bencana

ANGGARAN kegiatan kebencanaan Kabupaten Mukomuko pengusutannya memasuki tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Sejumlah saksi sudah diperiksa. Membidik dana bencana.



Ada dua anggaran kegiatan yang tengah fokus dirampungkan Kejari Mukomuko. Pertama dana Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2022 di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko dengan total anggaran Rp 348 juta. Kedua, dana penanggulangan bencana dengan tahun 2022 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mukomuko dengan total Rp 628 juta.

Seluruh anggaran dilaporkan habis digunakan oleh BPBD Mukomuko sebagai organisasi pelaksana daerah (OPD) teknis. Untuk BTT ini tidak dapat digunakan begitu saja. Prosedurnya, harus melalui tahapan BPBD menyurati Bupati Mukomuko, yang dilanjutkan Bupati memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini BKD Mukomuko untuk mencairkan dana yang telah diusulkan tersebut.

Barulah digunakan oleh BPBD. Sedangkan dana penanggulangan bencana memang merupakan anggaran yang ada di BPBD Mukomuko pada tahun 2022. Dua anggaran inilah diduga terdapat indikasi kerugian negara dalam pelaksanaannya.

Kepala Kejari Mukomuko, Rudi Iskandar SH, MH melalui Kasi Pidsus Agung Malik Hakim SH, MH mengatakan, di dalam dugaan Tipikor penggunaan anggaran kebencanaan ini, penyidik telah menyita kurang lebih 20 berkas baik DPA dua anggaran tersebut. Serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya.

Untuk mengetahui secara detail, berkaitan dengan laporan tersebut penyidik Kejari sebelumnya telah melakukan pemanggilan terhadap saksi bendahara BPBD pada waktu itu dengan inisial SM, dan kabid Perbendaharaan (Perben) Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko dengan inisial NZ. Direncanakan pada (10/10) nanti akan dilakukan pemanggilan dua orang saksi lagi.

“Sesuai dengan kebutuhan Penyidik, (10/10) kami akan panggil dua orang yang pertama Bendahara Badan Keuangan Daerah (BKD) pada waktu itu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) anggaran BTT. Sehingga diharapkan akan membuat terang dugaan Tipikor dana kebencanaan ini,” katanya.

Agung menambahkan, dalam perkara ini penyidik fokus memeriksa seluruh item penggunaan anggaran, baik pengadaan bantuan, pemberian bantuan, serta honorium petugas di lapangan, guna mengetahui berapa jumlah pasti dugaan Kerugian Negara (KN) yang disebabkan. Sehingga nantinya barulah mengerucut kepada calon tersangka dalam kasus ini.

“Berkaitan dengan nominal perkiraan KN kami belum bisa sampaikan, karena kami akan meminta terlebih dahulu Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu melakukan penghitungan kerugian negara (KN) dan auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk membantu penghitungan KN,” ujarnya.

Lanjutnya, penghitungan KN akan dilakukan setelah pemanggilan saksi-saksi oleh penyidik. Sedangkan berkaitan dengan target waktu pengungkapan kasus ini, Kejari Mukomuko akan berupaya maksimal secepatnya, sebelum akhir tahun 2023 ini akan ada tersangka dalam perkara ini.

“Kita akan maksimalkan sebelum akhir tahun ini jika tidak ada halangan akan ada tersangka. Berkaitan dengan jumlah tersangka kita belum bisa sampaikan begitu juga dengan estimasi kerugian negara,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Mukomuko Ruli ST, MT. Ia mengatakan meskipun saat ini terkait dugaan Tipikor dana kegiatan kebencanaan BPBD pada tahun 2022 terus dilakukan proses penyidikan oleh Kejari Mukomuko, pelayanan maksimal terus diberikan BPBD Mukomuko kepada masyarakat, karena adanya kasus tersebut tidak berpengaruh sama sekali dengan kinerja yang diberikan BPBD Mukomuko.

“Berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di tubuh BPBD Mukomuko, seluruhnya kami serahkan kepada pihak Kejari untuk membuktikan seperti apa kegiatan yang dapat merugikan negara tersebut,” katanya.

Ruli menambahkan, untuk dugaan korupsi dana penanggulangan bencana dan BTT ini terjadi pada tahun 2022. Sementara saat ini sebagian besar anggota beserta pimpinan sudah digantikan. Untuk lebih jelas berkaitan dengan dugaan tersebut anggota BPBD saat ini tidak mengetahui secara pasti. (pir)